

PENGUATAN KAPASITAS PELAKU BISNIS MIKRO MELALUI PENATAAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA: PANDANGAN ISLAM

Renny Oktafia dan Abdul Rahman Hidayat

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: renny.oktafia@umsida.ac.id

Abstrak

Kelompok usaha mikro merupakan kelompok yang dapat mendorong sektor riil, untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negara kita. Untuk itu, perlu peran dari seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhannya. Upaya mendorong pertumbuhan usaha mikro adalah dengan selalu memantau perkembangan usahanya, yaitu melalui proses pencatatan keuangan usaha yang tertata baik. Oleh karena itu, pendampingan pada kelompok usaha mikro ini, dilakukan dengan proses-proses untuk meningkatkan keahlian anggota kelompok, tentang pencatatan keuangan usaha yang sesuai dengan aturan pencatatan keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan dampingan adalah pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), dengan metode *Appreciative Inquiry*. Dengan beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu : *discovery*, *dream*, *design* dan *destiny*, sehingga dari tahapan-tahapan yang dilalui ini, ditemukan hal-hal positif yang dimiliki oleh kelompok dampingan, yang kemudian disusun strategi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan nilai dari hal-hal positif yang dimiliki tersebut. Hasil yang diperoleh dengan menerapkan pendekatan dan metode yang telah ditetapkan, yaitu kelompok dampingan telah mengalami peningkatan terkait keahliannya dalam melakukan pencatatan usahanya secara signifikan. Hal ini terbukti bahwa kelompok ini telah dapat membuat jurnal, neraca, dan laporan laba rugi secara sederhana.

Kata Kunci : Kelompok Usaha Mikro, Pencatatan Keuangan Usaha, Pendekatan ABCD

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan terhadap jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Semakin bagus kondisi ekonomi di sebuah wilayah, maka akan semakin rendah pula tingkat pengangguran yang dimiliki oleh wilayah tersebut, dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu kabupaten di Jawa Timur, yang dapat menekan tingkat kemiskinan adalah Sidoarjo. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017, menunjukkan bahwa Sidoarjo berada di peringkat keenam untuk persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur. Angka persentase kemiskinan di Sidoarjo, berada pada angka 6,23% setelah beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur, dengan urutan dari yang paling rendah tingkat persentase kemiskinannya, yaitu : kota Malang sebesar 4,17%; kota Batu sebesar 4,31%, kota Madiun sebesar 4,94%; kota Surabaya sebesar 5,39%; dan kota Mojokerta sebesar 5,73%.¹

Salah satu faktor yang dapat menekan tingkat kemiskinan, yaitu dengan mendorong serta mengembangkan sektor riil. Sektor riil ini dapat didorong, melalui pertumbuhan sektor usaha mikro. Untuk kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini menunjukkan angka sebesar 171.264 unit UMKM. Angka tersebut tersebar pada berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut : sektor pertanian sebanyak 34.395 unit usaha; sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 4 unit usaha; sektor industri pengolahan sebanyak 9.008 unit usaha; sektor konstruksi sebanyak 795 unit usaha; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 96.149 unit usaha; sektor transportasi sebanyak 5.096 unit usaha; sektor keuangan sebanyak 278 unit usaha; sektor jasa-jasa sebanyak 25.539 unit usaha.²

Menurut data diatas, dapat terlihat bahwa masih banyak potensi usaha mikro yang bisa dikembangkan di Sidoarjo, pada berbagai sektor yang ada. Hal ini nantinya, akan dapat berdampak pula pada

¹ www.jatim.bps.go.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.15 WIB

² www.diskopukm.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 18.30 WIB

pertumbuhan ekonomi Sidoarjo, untuk semakin menurunkan angka kemiskinan yang ada. Terdapat banyak faktor, yang menjadi penyebab tersendatnya pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya, diantaranya adalah terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan usaha, utamanya terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kondisi tersebut, disebabkan karena latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro, yang kurang terhadap pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari perguruan tinggi dalam memberikan *sharing* ilmu terkait penguatan pengetahuan masyarakat pelaku usaha mikro, melalui fungsi tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

Oleh kemampuan pelaku usaha mikro dalam pengelolaan keuangan bisnisnya, sangat perlu untuk selalu ditingkatkan, untuk menjaga kelangsungan aktivitas usaha. Hal ini, seperti yang telah dilakukan pula oleh beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat sebelumnya, antara lain : Siswanto (2011), dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu : “*Tingkat Manajerial Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kab. Kulonprogo*”, mengangkat bahwa pengelolaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kab. Kulonprogo di sisi keuangan, sebagian besar sekitar 54 % masih kurang baik pengelolaannya. Oleh karen itu, diperlukan program pelatihan dan pendampingan, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.

Demikian pula (Hasyim, Diana : 2013), dengan penelitiannya yaitu : “*Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Distribution Store (Distro) di Kota Medan*, mengatakan bahwa kemampuan menyusun dan menggunakan laporan keuangan sangat diperlukan oleh pelaku usaha *Distribution Store*. Hal ini, disebabkan karena laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi usaha, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan (Nurlaela, Siti : 2014) dalam penelitiannya, yaitu : “*Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM Kerajinan Gitar di kabupaten*

Sukoharjo” menunjukkan pelaku UKM minim dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penting bagi pelaku UKM untuk memahami cara menyusun laporan keuangan agar mengetahui perkembangan UKM mereka. Penyusunan laporan keuangan dianggap sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaku usaha kecil menengah.

(Saptono, Ari : 2016) tentang “Pelatihan Manajemen Usaha dan Pengelolaan Keuangan UKM Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna di Sukabumi Jawa Barat” menunjukkan kondisi TKI purna di Sukabumi belum memahami tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Pelatihan pembuatan manajemen usaha harus diterapkan untuk mengelola keuangan agar efektif serta menjadi sarana informasi dalam pengelolaan usaha, sehingga para TKI perlu memahami manajemen usaha agar dapat mengatur serta mengelola usaha dengan baik untuk memisahkan keuangan usaha dan pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan (Layyinaturrobaniyah : 2017) tentang “Pendampingan Keuangan Usaha Mikro di Desa Purwodadi Barat dan Pasir Bungkur Kabupaten Subang” mengatakan para pelaku UKM harus mampu mengelola keuangan dengan cara membuat laporan keuangan untuk menghitung hasil kinerja mereka, sehingga dapat diketahui besar kecilnya investasi yang mereka dapatkan, tidak hanya itu membuat laporan keuangan juga memberikan manfaat kepada pelaku usaha mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur untuk lebih mengembangkan usaha mikro serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lain misal dapat terciptanya suatu peluang kerja karena usaha yang semakin besar dan berkembang.

Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dengan Economic Entity Concept (Risnarningsih : 2017) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan penggunaan economic concept secara sederhana saja sangat berguna bagi pelaku UKM kedepannya dan dapat mengetahui informasi keuangan secara mendetail sehingga pengelolaan keuangan lebih terarah dan jelas. Salah satu usaha mikro Dhi Sablon dan Printing menerapkan pembuatan laporan keuangan dengan economic concept,

dimana economic concept dianggap mempermudah usahanya. Dengan menerapkan economic concept, pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangannya, sehingga jika ada kerugian atau masalah lain dalam keuangan lebih mudah untuk diketahui.

Kelompok dampingan saat ini adalah salah satu kelompok usaha mikro, yang berada di desa Sidoklumpuk kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo. Kelompok ini terdiri dari 10 (sepuluh) pedagang makanan, yang memerlukan tambahan keterampilan dalam mengelola keuangan usahanya. Dimana selama ini, para anggota kelompok ini telah melakukan pencatatan keuangan usaha, akan tetapi kurang tertata hanya sekedar dicatat saja. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan lagi kemampuannya dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, karena kegiatan pencatatan yang tertata dan sesuai dengan ketentuan, sangat diperlukan dalam memantau perkembangan usaha.

B. Metode

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), yaitu sebuah pendekatan yang bertujuan agar upaya kegiatan pembangunan, dilakukan dengan menempatkan posisi manusia sesuai dengan kapasitas potensi dan aset yang ada pada dirinya. Pada pendekatan ABCD ini, paradigma yang digunakan adalah bahwa *pertama*; segala sesuatu bentuk kegiatan diarahkan kepada konteks memahami dan melakukan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan yang dilakukan secara mandiri dan maksimal. *Kedua*; menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat yang mempunyai kekuatan dan energi positif, yang perlu untuk diidentifikasi, diketahui, difahami dan diinternalisasi, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan seluruh elemen komunitas yang ada di masyarakat tersebut.

Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah *Appreciative Inquiry*, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh hal positif, lalu menghubungkannya dengan cara perkuatan pada energi dan visi, untuk memperoleh perubahan guna terciptanya masa depan

organisasi yang lebih baik. Pada metode *Appreciative Inquiry* ini, bertujuan untuk mendorong seluruh anggota organisasi supaya fokus hanya pada hal-hal positif, sehingga tidak untuk melakukan analisa terhadap masalah dan solusi yang akan diberikan, melainkan lebih fokus pada bagaimana menggali sebanyak mungkin hal-hal positif yang dimiliki oleh organisasi. Untuk *Appreciative Inquiry*, terdapat beberapa tahapan proses yang dilalui yaitu : pertama, tahap *discovery* : melakukan pencarian mengenai hal-hal positif dan pengalaman yang sudah dilakukan oleh kelompok UKM; kedua, tahap *dream* : pada tahap ini menggali bayangan masa depan yang diinginkan, dimana yang diharapkan dengan pencatatan keuangan yang baik, dapat digunakan untuk mengakses permodalan lebih luas dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha; ketiga, tahap *design* : saat berada pada tahap ini, akan dilakukan penyusunan strategi, proses serta sistem dalam melakukan transformasi terhadap hal-hal positif yang ada pada kelompok UKM ini, sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan harapan (*dream*); dan keempat; tahap *destiny* : untuk tahap ini, mulai melakukan implementasi terhadap segala hal yang telah dirumuskan pada tahap *design*, dan secara berkelanjutan kelompok ini melakukan perubahan dalam menemukan sesuatu yang baru, sesuai yang diharapkannya.³

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan metode yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan data-data dan bentuk kegiatan, sebagai berikut :

1. Untuk tahap *discovery*, ditemukan hal-hal positif pada komunitas dampingan, antara lain : 1) anggota kelompok UKM telah melakukan pencatatan keuangan, meskipun kurang tertata dengan baik; 2) seluruh anggota kelompok mempunyai kemauan dan semangat untuk belajar pencatatan akuntansi sederhana; 3) anggota kelompok ini merupakan pelaku usaha mikro yang cukup punya pengalaman dalam mengelola usaha, karena usaha mereka rata-rata telah berdiri lebih dari 3 tahun.

2. Untuk tahap *dream*, pada kelompok ini berharap dengan mempunyai kemampuan yang meningkat dalam pencatatan keuangan usaha, maka dapat bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mensyaratkan adanya laporan keuangan dalam pengajuan permodalan. Dengan pencatatan keuangan bisnis yang baik, dapat memantau perkembangan usaha untuk acuan dalam meningkatkan kapasitas usaha yang lebih besar. Pencatatan keuangan bisnis ini, juga diharapkan oleh anggota kelompok, dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan bagi hasil kepada pihak-pihak yang bersyirkah dengan pelaku usaha bisnis di kelompok ini, selain itu bisa menjadi acuan dalam mengeluarkan zakat. Harapannya adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha komunitas ini semakin besar, karena peningkatan zakat yang dikeluarkan merupakan indikator bahwa usaha yang dilakukan juga meningkat. Harapan lainnya yakni dengan pencatatan keuangan yang baik, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengalokasikan keuntungan usaha, dimana bentuk alokasi ini berupa untuk menunjang keuangan rumah tangga dan juga dikembalikan lagi untuk membesarkan usaha.
3. Tahap *design*, pada tahap ini disusun strategi, proses dan sistem untuk mencapai yang diharapkan. *Design* yang dilakukan adalah dengan pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi.
4. Tahap *destiny*, yaitu mengimplementasikan seluruh rangkaian proses yang telah ditetapkan pada tahap *design*. Pada bagian **pelatihan** ini dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1) memberikan pengetahuan tentang pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga; 2) memberikan pengetahuan agar menghimpun dan mengumpulkan nota-nota terkait transaksi usaha, dengan urut sesuai dengan urutan tanggal transaksi yang dilakukan; 3) memberikan pengetahuan tentang jurnal, neraca dan laporan laba rugi sederhana. Selanjutnya; setelah pelatihan dilakukan, maka kemudian melakukan proses **pendampingan**, dimana pendampingan ini bertujuan untuk memastikan, bahwa bahan-bahan

yang telah diberikan saat pelatihan dapat dipahami dan dipraktekkan dengan baik, memberikan bimbingan serta arahan saat anggota kelompok ini mengalami kendala, ketika mempraktekkan materi-materi pelatihan. Kemudian, untuk mengetahui seluruh materi pelatihan benar-benar diaplikasikan secara menyeluruh, dan dapat diketahui progres perkembangan kemampuan dalam mengaplikasikannya, maka dilakukanlah **proses monitoring dan evaluasi**. Proses pada tahap ini dapat digambarkan, seperti gambar 1 berikut :



Gambar 1. Proses Peningkatan Kemampuan Dalam Pencatatan Keuangan Usaha Mikro

Menurut tahapan-tahapan diatas, bahwa kelompok UKM di desa Sidoklumpuk, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sudah selesai melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan, dimana pelatihan dilakukan dalam 2 (dua) kali sesi pelatihan. Kemudian, dilakukan proses pendampingan selama 1 minggu, dimana selama pendampingan nampak bahwa anggota kelompok UKM ini, telah memahami dan mengimplementasikan hasil pelatihan. Secara pemahaman dan penguasaan materi, sudah 85% telah dipahami dan dikuasai dengan baik. Apabila ditinjau dari seluruh peserta yang mengikuti pelatihan, hanya 1 (satu) orang saja yang belum paham dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa 95% peserta telah meningkat kemampuannya dalam pencatatan keuangan usaha. Pada saat proses monitoring, juga terlihat bahwa 95% peserta pelatihan telah mempraktekkan pencatatan keuangan usaha secara berkelanjutan dan baik. Dengan pengetahuan mengelola keuangan usaha ini, kemudian kelompok ini mengalokasikan keuntungan usaha, dengan ketentuan 75% keuntungan untuk menunjang keuangan

keluarga dan sisanya 25% dikembalikan untuk menambah modal usaha. Sebagaimana nampak pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Bentuk Alokasi Keuntungan Usaha Kelompok UKM

D. Kesimpulan

Pada uraian diatas, telah dipaparkan proses tahapan sampai dengan hasil selama melakukan pendampingan pada komunitas dampingan kelompok UKM. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat banyak hal positif yang ditemukan pada kelompok dampingan, yang dapat dikembangkan dan disempurnakan lebih baik lagi, terkait upaya dalam peningkatan kemampuan pencatatan keuangan usaha pada anggota kelompok dampingan. Hal positif tersebut diantaranya : sudah terbiasa melakukan pencatatan transaksi usaha meskipun belum sempurna, adanya semangat dari anggota kelompok untuk memperbaiki kualitas pencatatan keuangan usahanya, adanya pengalaman bisnis yang dimiliki sehingga mental bisnisnya telah terlatih.
2. Terjadi peningkatan kemampuan dalam pencatatan keuangan bisnis cukup signifikan, setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok dampingan.
3. Pencatatan keuangan bisnis tertata dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk beberapa hal, antara lain : melakukan alokasi keuntungan bisnis untuk penunjang keuangan keluarga,

penambahan modal usaha, pembayaran zakat, dan penghitungan bagi hasil dengan mitra bisnis.

Daftar Pustaka

Hasyim, Diana. 2013. *Kualitas Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Studi Kasus Pada Distribution Store (Distro) Di Kota Medan)*. Jupiis. Vol. 5. No. 2

Layyinaturrobaniah. dkk. 2017. *Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Di Desa Purwadadi Barat Dan Pasirbungur Kabupaten Subang*. Pekbis Jurnal. Vol. 9. No. 2.

Nurlaela, Siti. 2014. *Kemampuan Lpaoran Kuangan Usaha Kecil Menengah Pengaruhnya Terhadap KInerja UKM Kerajinan Gitar di Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Paradigma. Vol.12. No. 02.

Pedoman Pelaksanaan KKN Tematik Posdaya Berbasis ABCD Angkatan Ke-67 Tahun 2017, UIN Raden Fatah Palembang

Risnarningsih. 2017. *Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 1. No. 1.

Saptono, Ari. dkk. 2016. *Pelatihan Manajemen Usaha Dan Pengelolaan Keuangan Ukm Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna Di Sukabumi Jawa Barat*. Jurnal Sarwahita. Vol. 13. No. 1.

Siswanto. 2011. *Tingkat Manajerial Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kab. Kulonprogo*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. Ix. No. 1.

www.diskopukm.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 18.30 WIB

www.jatim.bps.go.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.15 WIB